

## **SISTEM PERINGATAN DINI UNTUK KONFLIK SOSIAL DI PERKOTAAN**

### **Kajian Pendahuluan Pembuatan Peta Digital Kota Tangerang ( *Early Warning System for Social Conflict in Cities* ) Studi to make Digital Map in tangerang City**

**Fathoni MOEHTADI**

**Abstract** Social conflict not merely happened at areas which initially are true identified as gristle area. Conflicts with different intensity also exist in the areas where there never happened over hundred years. To lessen possibility the happening of various broader social conflict and stress, early detection of social symptoms in society showing stress signals and conflict require to be gone through. This effort will be easier to conduct if there is a societal early warning system. With the existence of forewarning system, hence areas which tend to have crisis symptom and similar stress can be anticipated with certain actions to avoid. This method will be able to prevent broader conflict and stress ascending.

**Keywords:** Early detection, social conflict, urban area

---

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Krisis multidimensi dan ketegangan sosial yang mengancam keutuhan bangsa Indonesia semakin tinggi sejak 1997 dengan timbulnya berbagai ketegangan dan konflik dalam masyarakat baik secara horizontal maupun vertikal. Konflik sosial ini bukan hanya terjadi pada daerah-daerah yang semula memang diidentifikasi sebagai daerah rawan. Daerah-daerah yang sejak berpuluh bahkan beratus tahun tidak mengenal konflik pun ternyata juga mengalami hal serupa dengan intensitas yang berbeda-beda. Terjadilah kawasan-kawasan "baru" yang sangat rawan konflik dan ketegangan sosial.

Jika diamati secara seksama, ketegangan dan konflik sosial tersebut ternyata bukan terjadi secara tiba-tiba. Terdapat tahap-tahap tertentu yang mematangkan situasi hingga kondusif bagi terciptanya kerusuhan. Mengurangi kemungkinan terjadinya berbagai ketegangan dan konflik sosial yang lebih luas, suatu pendeteksian secara dini gejala-gejala sosial di dalam masyarakat yang menunjukkan isyarat-isyarat ketegangan dan konflik perlu ditempuh. Upaya ini akan lebih mudah dilakukan jika terdapat sistem peringatan dini. Adanya sistem peringatan dini, maka daerah-daerah yang cenderung memiliki gejala-gejala kerawanan dan ketegangan serupa dapat diantisipasi dengan tindakan-tindakan tertentu untuk menangkalnya.

Salah satu bagian dan sistem peringatan dini adalah adanya peta daerah rawan ketegangan dan konflik sosial. Peta daerah rawan konflik akan memuat antara lain kronologi peristiwa, akar masalah yang memungkinkan terjadinya ketegangan dan konflik (*Root of the problem*), faktor-faktor yang mempercepat (*Accelerating factor*) dan faktor-faktor pemicu (*Triggering factor*) ketegangan dan konflik sosial. Tidak jarang ketegangan dan konflik di suatu daerah mengilhami terjadinya ketegangan dan konflik di daerah lain.

Sebagai tahap awal dari kegiatan ini akan dideteksi kawasan yang mempunyai intensitas kegiatan industri dan dinamika masyarakat yang tinggi. Wilayah sampel diambil dari kota dengan peringkat pertama untuk kategori kota, yaitu Kota Tangerang. Mengingat wilayah kategori kota besar lazimnya sudah mempunyai tingkat kompleksitas sangat tinggi.

### 1.2. Tujuan

Penyusunan peta digital untuk sistem peringatan dini (*Early warning system*) mempunyai tujuan sebagai berikut.

- a. Menyajikan informasi melalui format peta digital di daerah pada kawasan-kawasan tertentu dengan intensitas dinamika masyarakat yang tinggi;
- b. Membantu memudahkan semua pihak, terutama para pengambil keputusan (*decision maker*) pada tingkat daerah untuk membuat langkah-langkah guna mencegah terjadinya ketegangan, kerusakan dan konflik sosial.

### 1.3. Metodologi

Pendekatan yang dilakukan untuk membangun peta digital ini adalah dengan melalui komputerisasi data masalah daerah rawan konflik sosial. Adapun metodologi yang ditempuh adalah sebagai berikut.

- a. Kajian kepustakaan untuk merumuskan konsep Proyek Rintisan Pembuatan Peta Digital Sistem Peringatan Dini. Selain itu dilakukan penyusunan parameter-parameter sebagai arahan untuk melakukan pengumpulan dan pengolahan data.
- b. Pengumpulan, pemasukan dan pengolahan data primer dan sekunder di kawasan studi sebagai dasar penyusunan peta daerah rawan konflik dengan memanfaatkan peta tematis dan mengombinasikannya dengan temuan-temuan hasil analisis.
- c. Pengujian lapangan atas peta tentatif yang telah disusun dan pengidentifikasian perangkat lunak dan kostumisasinya.
- d. Menyiapkan *database* daerah rawan konflik sosial.

---

## 2. KONSEP PETA DIGITAL SISTEM PERINGATAN DINI

### 2.1. Gambaran Umum

Satu diantara sekian cara untuk mewujudkan sistem peringatan dini adalah dengan membuat peta daerah rawan konflik sosial. Memudahkan pengolahan informasi peta diperlukan metoda pemetaan secara digital, peringatan dini berbasis Geographical Information System (GIS).

Mengingat banyaknya parameter dan informasi yang dihimpun sifatnya sangat dinamis baik dalam skala waktu maupun spasial.

## 2.2 Perangkat Keras

Susunan keperluan perangkat keras (*Hardware supply*) ini bervariasi dari bentuk yang paling sederhana seperti komputer pribadi dengan hanya *printer* atau *plotter* hingga ke yang lebih rumit dengan *work-station* atau *main frame*.

## 2.3 Perangkat Lunak

Komponen piranti lunak (*Software application*) baik dari sisi macam dan kemampuan sering berbeda satu sama lain. Namun, yang terpenting adalah yang sesuai dengan kebutuhan. Ini akan ditentukan oleh bentuk data, sumber, dan kemampuan analisis yang digunakan. Bentuk dan sumber data perlu mendapat perhatian yang serius, karena biaya dalam SIG atau Pembuatan Peta Digital untuk Sistem Peringatan Dini banyak didominasi oleh pemasukan data.

Data awal yang diperlukan untuk pengembangan sistem informasi peta rawan ketegangan dan konflik sosial mencakup antara lain:

- a. Kondisi Geografis. Data letak geografis, luas wilayah, kondisi fisik alam, topografi ketinggian dan kemiringan, peta dasar geografis, dan potensi sumberdaya alam.
- b. Faktor Penyebab. Data yang diperlukan terdiri dari data ekonomi sektor usaha, angkatan kerja, tingkat pengangguran, sumber-sumber ekonomi dan konsentrasi kegiatan ekonomi; data sosial tingkat

pendidikan, tingkat kesehatan, agama; data hukum sistem keamanan dan tingkat kriminalitas; dan data politik stabilitas wilayah, aparat pemerintahan dan kegiatan politik.

- c. Faktor yang Mengesalkan (*Grudging factor*). Data ini terkait dengan sumber-sumber masalah seperti kemacetan, banjir, sampah, dan masalah sosial (pedagang kaki lima/PKL, anak jalanan, gelandangan dan pengemis /gepeng, dan kupu-kupu malam).
- d. Faktor Pemicu (*Triggering factor*). Data yang terkait dengan faktor ini adalah aspek budaya (sebaran etnis, perilaku masyarakat, dan adat istiadat).
- e. Faktor yang Mempercepat. Data yang terkait dengan faktor ini adalah data demografi konsentrasi wilayah permukiman, rasio penduduk menurut umur, jenis kelamin, dan penduduk menurut etnis.

Data tersebut diproses secara grafis spasial maupun numerik dengan pengodean warna dan pembuatan *hardcopy* jika diperlukan. Pemrosesan dan analisis data spasial dan tekstual secara statistik, penggabungan, pemotongan, penyatuan, dengan penampilan data gambar atau warna, tampilan grafik dan tabulasi data. Dengan dukungan fasilitas multimedia dari perangkat keras yang digunakan akan dihasilkan sistem informasi yang memiliki tingkat kemampuan tinggi.

## 3. IDENTIFIKASI PARAMETER

### 3.1. Umum

Penentuan parameter-parameter dilakukan sebagai arahan untuk

memandu pengolahan data. Parameter yang tersedia dapat disusun dalam daftar untuk dikaji. Dalam kajian ini akan diambil lima (5) parameter yang diasumsikan sebagai sumber utama konflik.

- a. Pola permukiman dan pola persebaran penduduk,
- b. Struktur dan komposisi bidang usaha yang ditekuni warga menurut suku, agama, ras dan antar golongan dalam masyarakat (SARA),
- c. Struktur dan komposisi birokrasi pemerintah, terutama posisi-posisi strategis menurut SARA, Komposisi dan konstelasi pendidikan dasar, menengah, tinggi menurut strata sosial ekonomi masyarakat, dan
- d. Keberadaan organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan menurut SARA, terutama suku dan agama.

### 3.2. Pola Permukiman dan Pola Persebaran Penduduk

Pola permukiman dan persebaran penduduk biasanya mengikuti kegiatan yang ada pada suatu wilayah. Permukiman dan penduduk akan padat dan besar jumlahnya pada wilayah pusat kota, wilayah industri dan perdagangan. Pola permukiman terbagi menjadi tiga, yaitu permukiman dengan pola teratur (tertata), pola tidak teratur (tidak tertata) dan pola campuran.

#### a. Permukiman Tertata

Secara umum permukiman tertata adalah permukiman yang direncanakan menurut kaidah planologi. Ini bisa dilihat pada pembangunan permukiman yang dikembangkan oleh pemerintah seperti Perumnas, RS dan RSS

maupun oleh swasta (*Real estate*). Kondisi lingkungan di permukiman ini secara umum baik, dengan prasarana dan sarana yang memadai.

#### b. Perumahan Tidak Tertata

Perkembangan kawasan permukiman ke segala arah dan pertumbuhan pusat-pusat kegiatan yang tersebar di berbagai wilayah kota secara tidak langsung merangsang pertumbuhan permukiman pada lokasi-lokasi di sekitarnya atau daerah-daerah yang nilai lahannya terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Lokasi-lokasi tersebut menyebar menjadi daerah-daerah kritis seperti bantaran sungai, pinggir rel kereta api, jalur hijau, jalur jalan, jalur tegangan tinggi, sekitar kawasan industri dan kawasan pusat kegiatan.

#### c. Perumahan Campuran

Selain kawasan tersebut terdapat juga kawasan-kawasan yang ditempati oleh masyarakat mengikuti kondisi lingkungan setempat. Pada umumnya kawasan tersebut sangat beragam dengan kondisi fisik bangunan campuran, yaitu bangunan permanen, semi permanen, dan sementara. Bangunan sementara berkaitan erat dengan kekumuhan suatu daerah. Semakin tinggi prosentase bangunan sementara, semakin tinggi prosentase perumahan kumuh di daerah tersebut.

### 3.3. Struktur dan Komposisi Bidang Usaha

Bidang usaha mencakup usaha pertanian yang meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan dan perikanan; industri pengolahan; perdagangan; dan jasa (angkutan, komunikasi, keuangan, penginapan dan

restoran. Secara umum bidang usaha industri, perdagangan dan jasa masih didominasi oleh warga keturunan. Sedangkan usaha pertanian banyak digeluti oleh warga pribumi.

### 3.4. Struktur dan Komposisi Birokrasi Pemerintahan

Struktur dan komposisi birokrasi masih didominasi oleh pribumi, sedangkan warga keturunan tampaknya sulit untuk memasuki sektor pemerintahan. Pada era reformasi kesempatan bagi warga keturunan untuk masuk bidang pemerintahan mulai terbuka. Namun sayang kesempatan ini justru terkendala oleh munculnya isu putra daerah.

### 3.5. Komposisi dan Konstelasi Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia. Jika pembangunan yang dilakukan tidak dapat mengandalkan sumberdaya alam yang terbatas, maka peningkatan sumberdaya manusia menjadi penting karena akan menjadi modal untuk menggerakkan pembangunan. Bidang pendidikan sampai saat ini masih merupakan sesuatu yang mahal bagi kebanyakan orang. Meskipun program pendidikan sembilan tahun dari pemerintah telah berjalan. Namun belum seluruh masyarakat dapat merasakannya.

### 3.6. Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Keberadaan organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan dapat dijadikan parameter untuk melihat sumber utama konflik. Tidak sedikit keberadaan organisasi sosial yang menimbulkan konflik, meskipun sebagian besar

organisasi sosial tidak menimbulkan masalah. Organisasi sosial kemasyarakatan tumbuh dari pemerintah, partai politik, maupun masyarakat umum dalam bentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau yayasan.

---

## 4. ANALISIS DAN PENGKAJIAN

### 4.1. Umum

Pada tahap ini dilakukan kegiatan analisis dan pengkajian terhadap parameter-parameter yang telah ditentukan guna penyusunan peta digital untuk sistem peringatan dini di Kota Tangerang. Parameter-parameter yang telah ditentukan diuji di lapangan untuk mengetahui seberapa jauh parameter tersebut dapat digunakan. Perlu diketahui karakteristik dari parameter dan kebutuhan data yang sesuai, sehingga dapat ditransformasikan ke dalam peta digital yang diharapkan sesuai dengan wilayah penelitian.

### 4.2. Karakteristik Parameter

Indikator-indikator sosial selalu berkaitan dengan skala perkotaan. Kota yang sangat heterogen secara sosial lazimnya dijumpai pada kota besar. Kota dengan heterogenitas sedang dijumpai pada kota menengah. Kota yang cenderung homogen secara sosial mudah dijumpai pada kota kecil. Tidak seperti di dalam SIG yang selalu menggunakan variabel yang *discret*, batas-batas sosial yang *continuous* menjadi lebih cenderung abu-abu, *fuzzy* (campur), sehingga yang dapat dilakukan adalah melakukan pendekatan-pendekatan (*aproximities*)

saja. Selain itu, metoda analisisnya tergantung pada: 1) apakah menggunakan *entropy theory*, di mana ada kesenjangan di situ terjadi ketidakstabilan; atau 2) ketersediaan sarana, seperti jaringan transportasi/komunikasi. Tema-tema yang diinginkan juga harus didefinisikan secara jelas.

Perlu dibangun suatu asumsi bahwa penutupan akses oleh suatu kelompok tertentu terhadap sumberdaya strategis (ekonomi dan non-ekonomi) pada gilirannya akan memunculkan ketimpangan dan ketidakadilan. Ketidakadilan yang diidentifikasi mencakup pada 6 (enam) bidang, yaitu 1) ekonomi; 2) sosial; 3) hukum; 4) politik; 5) budaya; dan 6) demografi.

Masalah-masalah ekonomi, sosial, hukum dan politik dalam kaitan dengan anatomi konflik sosial sering dipandang sebagai faktor penyebab utama (*Root of the problem*). Masalah demografi dipandang sebagai faktor yang memperlancar (*Facilitating factor*), sedangkan masalah budaya dipandang sebagai faktor yang memicu (*Triggering factor*) terjadinya konflik sosial.

Dari 6 (enam) ketimpangan atau ketidakadilan ini, akan dielaborasi melalui penggunaan parameter-parameter tertentu sebagai arahan untuk melakukan pengumpulan dan pengolahan data. Berbagai ketidakadilan yang diasumsikan sebagai sumber utama konflik ini dilihat dari 5 parameter sebagai berikut: 1). Pola permukiman dan pola persebaran penduduk, 2). Struktur dan komposisi bidang usaha yang ditekuni warga menurut suku, agama, ras dan antar

golongan dalam masyarakat (SARA), 3). Struktur dan komposisi birokrasi pemerintah, terutama posisi-posisi strategis menurut SARA, 4). komposisi dan konstelasi pendidikan dasar, menengah, tinggi menurut strata sosial ekonomi masyarakat, dan 5). keberadaan organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan menurut SARA, terutama suku dan agama. Disadari bahwa dari kelima parameter tersebut, keadilan hukum tampaknya belum dapat sepenuhnya terwakili.

Parameter-parameter yang diuraikan di bawah ini mungkin dapat dipergunakan. Namun yang perlu dipikirkan adalah bagaimana pembobotannya (*Scoring system*) dan institusi pengelola konflik yang mungkin juga mampu menetralisasi terjadinya ketidakseimbangan antara satu parameter dan parameter lainnya.

Parameter-parameter termaksud dielaborasi sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 4.3. Data Kontinyus (*continuous data*)

Dari parameter yang tersedia dapat disusun suatu daftar untuk kemudian diuji, manakah yang berkaitan secara teknis faktor yang mempersiapkan suatu kondisi (*Preparatory factor*) dan faktor yang menjadi pemicu (*Triggering factor*).

Data sekunder yang tersedia di Kantor Statistik berupa data *time series* (5-10 tahun) mungkin dapat dipergunakan (antara 1990-2000). Atau jika tersedia mungkin data dari tahun 1985 hingga 2005. Pemanfaatan data menurut tahun akan lebih bermanfaat jika mengidentifikasi pula data historis terjadinya konflik; kapan, di mana,

No.	Masalah	Parameter Ketimpangan-ketidakadilan (Dalam banyak kasus parameter ini berkaitan dengan variabel suku, ras, agama dan antar golongan)
1.	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proporsi pemuda/remaja penganggur</li> <li>• Proporsi penguasaan sektor usaha</li> </ul>
2.	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proporsi pemuda/remaja putus sekolah (<i>drop-out</i>)</li> <li>• Proporsi tingkat pendidikan</li> </ul>
3.	Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proporsi kasus-kasus hukum yang tidak selesai</li> <li>• Proporsi keputusan pengadilan yang tidak adil</li> </ul>
4.	Politik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proporsi pejabat (eselon 1-4)</li> <li>• Proporsi pengurus partai politik</li> </ul>
5.	Budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahasa pergaulan yang dipakai</li> <li>• Standar tingkah laku (<i>unggah-ungguh</i>)</li> </ul>
6.	Demografi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proporsi kelompok dalam satu lingkungan</li> <li>• Pola permukiman (mencampur atau mengelompok)</li> </ul>

mengapa, siapa saja yang terlibat, dan sebagainya. Selain itu, kajian-kajian yang sudah ada dapat dimanfaatkan untuk melengkapi parameter yang telah dirumuskan. Juga upaya lain yang mungkin untuk memperoleh data sesuai dengan arahan parameter yang dipergunakan.

#### 4.5. Data Diskrit

Data diskrit (*Discrete data*) merupakan data yang sifatnya spasial atau keruangan atau kewilayahan dapat berupa peta biasa atau digital. Data spasial ini meliputi peta pemanfaatan ruang atau penggunaan lahan, daerah rawan banjir, titik-titik permasalahan, dan data lainnya yang berupa penyajian dalam bentuk peta.

#### 4.6. Transformasi Data Kontinyus ke Data Diskrit

Data statistik atau data kontinyus merupakan data yang diperoleh melalui survei lapangan atau *survei literature*. Data ini mencakup yang bersifat kualitatif (angka), yang bersifat kuantitatif (narasi), dan yang berupa gambar (raster). Data ini akan dibentuk menjadi

data diskrit data spasial atau kewilayahan melalui *overlapping (joint table)* antara data statistik dan data spasial, sehingga menghasilkan peta digital yang diperlukan pada sistem peringatan dini di Kota Tangerang.

#### 4.7. Studi Kasus di Kota Tangerang

Kota Tangerang, Provinsi Banten dipilih sebagai daerah studi karena secara langsung berbatasan dengan Kota Metropolitan Jakarta. Kota Tangerang mempunyai lebih dari 260 industri, dari yang berteknologi sederhana hingga yang berteknologi canggih. Ini merupakan penggerak utama (*Prime mover*) dinamika kota, sehingga perekonomian kota sangat berkembang intensif (*Growing economic*). Pesatnya perkembangan kota ini membawa dampak yang luas secara sosial, ekonomi maupun budaya.

Mengidentifikasi penyebab terjadinya konflik, *stereotype* mungkin berguna.

Namun, dalam kasus Tangerang perlu dilakukan dengan hati-hati. Sebagai contoh, karena sektor industri lebih dominan, SARA tampaknya

kurang merupakan potensi konflik dibandingkan dengan hubungan buruh-majikan. Selain itu, penduduk Tangerang yang bekerja di Jakarta sebagai tenaga kasar dan pemukim yang menempati daerah-daerah strategis yang dibangun oleh *real estate* justru menciptakan batas-batas sosial (*Social boundaries*) yang menyimpan peluang konflik.

#### a. Kondisi Geografi

Batas-batas wilayah Kota Tangerang adalah sebelah utara, berbatasan dengan Kecamatan Teluknaga dan Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang; sebelah selatan, berbatasan dengan Kecamatan Curug, Kecamatan Serpong dan Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang; sebelah timur berbatasan dengan DKI Jakarta; sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang.

Luas wilayah Kota Tangerang adalah 183,78 km<sup>2</sup> termasuk luas Bandara Soekarno-Hatta sebesar 19,69 ha. Bandara ini jaraknya sekitar 180 km dari Ibukota Provinsi Jawa Barat dan sekitar 27 km dari DKI Jakarta. Wilayah Kota Tangerang meliputi 13 kecamatan.

#### b. Pola Permukiman

Perkembangan kawasan permukiman ke segala arah dan tumbuhnya pusat-pusat kegiatan yang tersebar di berbagai wilayah Kota Tangerang secara tidak langsung merangsang per-tumbuhan permukiman pada lokasi-lokasi di sekitarnya. Seperti permukiman yang dibangun oleh swasta dan pemerintah. Ini akibat akumulasi kebutuhan permukiman yang terus meningkat sebagai akibat

pertambahan penduduk. Permukiman yang dibangun oleh pemerintah (Perumnas, RS dan RSS) dan swasta (*Real estate*) berupa permukiman tertata hampir terdapat di seluruh wilayah Kota Tangerang.

Sedangkan bagi penduduk yang kurang mampu yang berada pada pusat-pusat kegiatan membangun permukiman pada daerah yang nilai lahannya rendah dan pada daerah kritis, seperti bantaran sungai, pinggir rel kereta api, jalur hijau, jalur jalan, jalur tegangan tinggi, sekitar kawasan industri dan sekitar kawasan pusat kegiatan.

Selain kawasan permukiman tersebut di atas terdapat juga banyak kawasan atau lingkungan yang ditempati oleh masyarakat yang perencanaannya mengikuti kondisi lingkungan setempat. Pada umumnya kawasan-kawasan tersebut sangat beragam dengan kondisi fisik bangunan bercampur antara bangunan permanen, semi permanen, dan sementara.

Permasalahan permukiman yang muncul sejalan dengan perubahan kondisi ekonomi adalah:

- Pola persebaran permukiman belum teratur sementara arah perkembangannya belum dapat dikendalikan ke arah yang direncanakan. Ini karena sukarnya dilakukan *joint planning* dan *joint development* antar pengembang dan antara pengembang dan perumahan biasa.
- Pengadaan rumah selama ini belum mencapai target rencana. Luas area perumahan yang direncanakan berdasarkan izin lokasi yang telah dikeluarkan



adalah 3.520,55 ha. Sedangkan area yang telah dibebaskan adalah 1.363,134 ha. Dari angka tersebut dapat diketahui bahwa lahan *idle* yang ada saat ini lebih kurang 84,5% dari yang direncanakan.

- Krisis moneter menyebabkan menurunnya pasar perumahan, sehingga tipe rumah yang ada perlu disesuaikan pengembang.
- Kemampuan pengembang (swasta) dalam menyediakan perumahan menurun.
- Kebutuhan perumahan sebagai penunjang industri belum terpenuhi, sehingga banyak rumah tidak layak huni disewakan kepada pekerja industri.
- Kampung kumuh yang belum tertangani masih sekitar 25 lokasi.
- Pertumbuhan penduduk yang cenderung meningkat akan mengakibatkan meningkatnya kebutuhan perumahan.

Selain hal-hal tersebut di atas timbul juga masalah kesenjangan dalam hal permukiman. Permukiman *real estate* yang dijaga oleh para penjaga terkesan eksklusif, tidak mau bercampur dengan lingkungan sekitarnya. Fasilitas yang ada di dalam perumahan tidak dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar. Padahal permukiman sekitar kekurangan fasilitas. Tidak jarang jalan penduduk ditutup oleh pihak pengembang *real estate*, sehingga penduduk setempat harus memutar lebih jauh.

### c. Struktur dan Komposisi Bidang Usaha

Bidang usaha di Kota Tangerang terdiri dari usaha pertanian yang

meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan darat; industri; perdagangan dan jasa.

Secara umum luas areal pertanian tanaman pangan di Kota Tangerang lima tahun terakhir cenderung menurun. Ini disebabkan adanya perubahan areal pertanian menjadi permukiman, industri dan prasarana umum. Penurunan luas areal mengakibatkan penurunan hasil produksi pertanian.

Pembangunan industri di Kota Tangerang diarahkan untuk mendorong terciptanya struktur ekonomi yang seimbang dan kokoh dalam rangka menciptakan landasan perekonomian yang kuat agar mampu berkembang atas kekuatannya sendiri. Pembangunan sektor ekonomi mencakup industri besar, sedang, kecil dan rumah tangga. Sektor industri ini menyerap banyak tenaga kerja. Banyaknya industri maka banyak pendatang yang bekerja pada sektor ini. Secara tidak langsung terjadi persaingan tenaga kerja antara pekerja pendatang dan lokal. Pekerja pendatang lebih banyak daripada pekerja lokal. Selain tenaga kerja masalah upah dan kesejahteraan tenaga kerja menjadi isu yang hangat. Keadaan ini sering menimbulkan karyawan berdemonstrasi menuntut haknya kepada pihak industri. Situasi ini dapat dimanfaatkan pihak-pihak yang ingin menciptakan kerusuhan.

Perdagangan di Kota Tangerang selain sektor formal juga dikenal sektor informal. Penertiban terhadap sektor informal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang sering menimbulkan konflik, karena kebanyakan dari pedagang kaki lima tidak mau dipindahkan dengan

alasan tempat barunya sepi pembeli. Keberadaan sektor informal ini kadangkala memengaruhi perolehan omzet pedagang resmi terutama di pasar, karena segala kebutuhan sudah tersedia di luar pasar atau keberadaannya menutupi toko-toko yang ada. Sebagian besar pedagang kaki lima adalah warga pendatang.

Sektor jasa di Kota Tangerang cukup banyak di antaranya adalah penginapan dan restoran, angkutan dan komunikasi dan keuangan. Angkutan umum terutama angkutan kota jumlahnya cukup banyak pada pagi dan sore hari yang sering menyebabkan kemacetan. Selain usaha jasa tersebut marak juga usaha jasa yang dilakukan oleh wanita tuna susila. Kebanyakan dari mereka bekerja di sektor ini karena pendapatannya yang menjanjikan. Mereka bekerja sendiri atau dikelola oleh geromo. Selain wanita ada juga waria yang bekerja di sektor ini. Biasanya mereka mangkal di hotel-hotel, tempat-tempat hiburan atau pinggir jalan. Mengatasi mereka pihak pemma pun sering melakukan penertiban, tetapi tetap saja tidak terselesaikan secara tuntas. Tidak jarang keberadaan mereka menimbulkan konflik dengan penduduk tempat mereka mangkal.

#### **d. Struktur dan Komposisi Birokrasi**

Secara umum struktur dan komposisi birokrasi di Kota Tangerang masih didominasi oleh golongan pribumi, dari mulai bawahan hingga pejabat, dari mulai tingkat kelurahan hingga kota.

#### **e. Komposisi dan Konstelasi Bidang Pendidikan**

Fasilitas pendidikan di Kota Tangerang sudah tersedia lengkap dari mulai Taman Kanak-kanak (TK) sampai Perguruan Tinggi (PT). Sekolah TK semuanya berstatus sekolah swasta dengan jumlah 205 buah. SD terdiri dari 413 sekolah negeri dan 82 swasta. SLTP sebanyak 19 sekolah negeri dan 95 swasta. SMU sebanyak 7 sekolah negeri dan 44 swasta. Sedangkan untuk PT sebanyak 5 buah semuanya berstatus swasta. Meskipun fasilitas pendidikan sudah sangat lengkap tapi masih banyak anak usia sekolah yang tidak bersekolah atau tidak bisa melanjutkan lagi. Kondisi ekonomi menjadikan anak-anak yang seharusnya sekolah terpaksa membantu orang tua mencari nafkah. Keberadaan mereka terlihat di jalan-jalan menjadi pengamen, penyemir sepatu, pedagang asongan dan lain sebagainya.

#### **f. Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan**

Organisasi sosial dan kemasyarakatan yang ada di Kota Tangerang terdiri dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yayasan dan lain sebagainya yang bergerak di bidang sosial untuk memberikan bantuan atau melakukan pemberdayaan masyarakat.

---

## **5. HASIL KAJIAN**

### **5.1. Umum**

Hasil kajian terhadap parameter yang berkaitan dengan variabel-variabel suku, ras, agama, dan antar golongan untuk

kasus Kota Tangerang. Meskipun merupakan wilayah industri, penting dipertimbangkan sebagai penyebab terjadinya konflik.

## 5.2. Ketersediaan Data Lapangan

Ketersediaan data di lapangan masih dirasakan sangat kurang dan belum memadai. Ini dapat dilihat dari data *time series* yang tidak lengkap dan kurang. Perolehan peta digital yang sudah pernah dibuat sebagai dasar untuk pembuatan sistem peringatan dini sangat sulit diperoleh, padahal kegiatan ini sangat terbatas waktunya. Data historis kurang tersedia, bahkan seringkali tidak lengkap untuk menggambarkan kronologis suatu konflik.

Menutupi kekurangan data dilakukan pengumpulan, pemasukan dan pengolahan data primer. Selain itu juga pemanfaatan beberapa nara sumber untuk mengkaji suatu gejala sosial tertentu bermakna secara substansial.

## 5.3. Kendala yang Dihadapi

Kendala yang dihadapi dalam pembuatan peta digital untuk sistem peringatan dini ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

### a. Kendala Teknis

- 1) Data yang tersedia kurang lengkap;
- 2) Peta digital yang pernah dibuat tidak diperoleh;
- 3) Waktu yang terbatas.

### b. Kendala Substansial

- 1) Penentuan parameter masih perlu didiskusikan lagi dengan pakar

sosiologi dan SIG;

- 2) Parameter yang digunakan belum sepenuhnya mewakili;
- 3) Ketidakseimbangan antara satu parameter dan parameter lainnya;
- 4) Oleh karena merupakan hal baru, kegiatan ini sering menimbulkan kekurangjelasan dalam substansi pengerjaan. Terutama yang terkait dengan kriteria dan faktor-faktor penentu terjadinya konflik sosial.

---

## 6. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

### 6.1. Simpulan

Upaya penyusunan peta digital untuk sistem peringatan dini merupakan upaya awal yang membutuhkan banyak persiapan baik dari segi teknologi maupun sumberdaya manusia yang mengelola sistem termaksud. Sejauh ini, upaya ini belum sepenuhnya berhasil. Jika berhasil, Pemerintah Kota Tangerang akan lebih mudah mendeteksi suatu potensi konflik sebelum konflik itu meletus menjadi terbuka. Melalui langkah ini, pengelolaan pertumbuhan Kota Tangerang akan lebih mudah dilakukan, karena terciptanya prakondisi yang dibutuhkan untuk pembangunan kota khususnya dan pembangunan masyarakat umumnya.

### 6.2. Rekomendasi

Rekomendasi dibagi dalam dua kategori. *Pertama*, kategori langkah-langkah strategis antarwaktu. *Kedua*, upaya-upaya berjangka waktu tertentu yang pada gilirannya dibedakan menurut jangka pendek, menengah dan

jangka panjang.

Langkah-langkah strategis antar waktu perlu ditempuh dengan menekankan pada tiga hal, yaitu; 1) Sistem peringatan dini seyogyanya segera dimatangkan pembentukannya; 2) Perencanaan tata ruang perlu disusun dengan mengakomodasikan semua kepentingan; dan 3) Penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu.

Terkait dengan langkah-langkah strategis, perlu dirancang upaya-upaya berjangka waktu tertentu.

- a. Jangka Pendek;
  - Mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan tata ruang;
  - Penguatan satuan keamanan baik polisi maupun pamong praja;
  - Proses hukum terhadap mereka yang melakukan tindakan kriminal;
  - Pembangunan rumah singgah bagi anak jalanan.
- b. Jangka Menengah;
  - Membangun pola-pola permukiman terpadu;
  - Mewajibkan pihak pengembang perumahan dan industri untuk memenuhi kewajiban fasilitas sosial dan fasilitas umumnya;
  - Membangun rumah murah bagi masyarakat.
- c. Jangka Panjang;
  - Waspada akan terjadinya konflik meski sekecil apapun;
  - Pemantapan tekad dan tindakan konkrit pemerintah dalam menegakkan hukum;

- Pemberantasan korupsi khususnya di kalangan aparat penegak hukum. Ini untuk mencegah terjadinya pelibatan massal secara tidak terkendali dalam pengelolaan pertumbuhan kota.

---

## PUSTAKA ACUAN

- Badan Pusat Statistik Kota Tangerang, 1998. *Statistik Industri Besar-Sedang Kotamadya Tangerang*. Tangerang; BPS Kodya Tangerang bekerjasama dengan Bappeda Kodya Tangerang
- 1999. *Kota Tangerang Dalam Angka 1999*. Tangerang; BPS Kota Tangerang bekerjasama dengan Bappeda Kota Tangerang.
- 2000. *Kota Tangerang Dalam Angka 2000*. Tangerang; BPS Kota Tangerang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Tangerang.
- Bruner, Edward M., 1974. *The Expression of Ethnicity in Indonesia*, ASA Monographs, Tavistock Publications, London, p. 251-280.
- Moehtadi, Fathoni, 2002. "Konflik Poso: Suatu Anatomi" dalam *Jurnal Dinamika Masyarakat* Vol. 1, No. 1, Juli.
- Universitas Indonesia. 2001. *Laporan Akhir Penelitian Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Tangerang*, Banten, Bapeda Kota Tangerang bekerjasama dengan Laboratorium Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Pemerintah Daerah Kota Tangerang, 1994. *Laporan Akhir Review Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang 1994-2010*, Pemerintah Daerah Kota Tangerang.

**Fathoni MOEHTADI**, Peneliti pada Pusat Pengkajian Kebijakan Peningkatan Daya Saing, Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi, BPPT Jakarta.